

Relasi Kuasa Aceh-Johor dalam Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda: Kajian Antropologi Sastra

Reza Pahlevi
Ginting¹

Universitas
Malikussaleh,
Indonesia

r.p.ginting@unimal.ac.id

AB Takko Bandung²

Universitas Hasanuddin,
Indonesia

takkobandung@gmail.com
[m](https://www.instagram.com/takkobandung)

Alexandra de Araujo
Tilman³

Universidade Nacional de
Timor Lorosa'e, Timor-Leste

alexandratilman28@gmail.com
[m](https://www.instagram.com/alexandratilman28)

*Corresponding author: Reza Pahlevi Ginting: r.p.ginting@unimal.ac.id.

Diterima: 08-06-2026

Direvisi: 21-10-2026

Tersedia Daring: 01-11-2026

Abstrak: Kajian tentang Aceh dan Johor telah membahas diplomasi, hukum, dan simbol kerajaan, sedangkan hubungan antarmekanisme budaya dalam representasi kekuasaan pada hikayat masih perlu dijelaskan. Penelitian ini bertujuan menafsirkan mekanisme legitimasi relasi kuasa Aceh-Johor dalam *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda* edisi alih aksara Ramli Harun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dalam perspektif antropologi sastra dengan satu kasus tekstual. Dua belas kelompok episode dikaji melalui pembacaan dekat, pencatatan, dan analisis tematik dua tingkat. Lima sirkuit, yaitu yuridis, religius, kekerabatan, militer-maritim, dan punitif, digunakan sebagai kategori tingkat pertama. Hubungan antarsirkuit kemudian ditafsirkan sebagai pola naratif integratif dan koersif serta fungsi restoratif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Raja Raden diintegrasikan melalui pengakuan keputusan, penerimaan Islam, perkawinan, musyawarah, dan pelibatan militer. Si Ujut ditempatkan sebagai sasaran tindakan koersif dalam rangkaian pengingkaran, kekerasan, perlawanan, dan penghukuman. Fungsi restoratif muncul ketika penutupan cerita menghubungkan berakhirnya ancaman Si Ujut dengan keamanan dan kemakmuran Aceh. Perbedaan kedua tokoh menunjukkan bahwa posisi politik dalam cerita ditentukan oleh tindakan dan afiliasi, bukan semata-mata asal kerajaan. Temuan ini menjelaskan konstruksi legitimasi dan konstruksi memori budaya dalam satu edisi hikayat, jangkauannya tidak mencakup pembuktian penerimaan masyarakat atau kebenaran seluruh peristiwa sejarah.

Kata Kunci: aceh-johor, antropologi sastra, relasi kuasa, hikayat

Abstract: Studies of Aceh and Johor have examined diplomacy, law, and royal symbols, while connections among cultural mechanisms in hikayat require further explanation. This study interprets the mechanisms legitimising Aceh-Johor power relations in *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda*, transliterated by Ramli Harun. It adopts a qualitative descriptive-interpretive approach within literary anthropology and examines one textual case. Twelve episode groups are examined through close reading, note-taking, and two-level thematic analysis. Five circuits-juridical, religious, kinship, military-maritime, and punitive serve as first-level categories. Their connections yield integrative and coercive narrative patterns and a restorative function. The findings indicate that Raja Raden is integrated through recognition of rulings, conversion to Islam, marriage,

consultation, and military participation. Si Ujut becomes the target of coercive action within a sequence of broken promises, violence, resistance, and punishment. The restorative function emerges when the narrative ending connects the removal of his threat with Aceh's security and prosperity. The distinction between these characters indicates that political positions depend on actions and affiliations rather than territorial origins alone. These findings shed light on the construction of legitimacy and cultural memory within a single edition of a folktale, their scope does not extend to proving public acceptance or the veracity of all historical events.

Keywords: aceh-johor, literary anthropology, power relations, hikayat

Pendahuluan

Dalam masyarakat Melayu, hikayat memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembentukan sekaligus pewarisan ingatan budaya. Melalui hikayat, masyarakat bukan hanya mengenang peristiwa masa lalu, tetapi juga merumuskan pandangan mengenai raja yang ideal, keadilan, kedaulatan, agama, kekerabatan, kesetiaan, serta batas antara kekuasaan yang dianggap sah dan kekuasaan yang dinilai menyimpang (Ifnaldi, 2020). Oleh karena itu, hikayat tidak cukup diperlakukan sebagai rekaman faktual tentang masa lampau. Teks tersebut perlu dipahami sebagai konstruksi budaya yang memilih, menyusun, dan memaknai kembali pengalaman sejarah berdasarkan pandangan sosial masyarakat yang mewarisinya (Hirst dan Coman, 2018). Gambaran kekuasaan yang muncul dalam hikayat dengan demikian dibentuk melalui strategi penceritaan yang menentukan siapa yang layak memerintah, nilai apa yang menjadi dasar legitimasi, dan tindakan apa yang dipandang perlu untuk memulihkan ketertiban.

Persoalan tersebut dapat diamati dalam *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda* yang dialihaksarakan oleh Ramli Harun (1985). Edisi yang diterbitkan pada 1985 itu berasal dari naskah milik Ishak Peutua Gam di Meureudu. Menurut keterangan pemiliknya, naskah tersebut disusun pada 1975. Harun juga menjelaskan bahwa teks itu merupakan versi lain dari *Hikayat Malem Dagang*, meskipun keduanya memperlihatkan sejumlah perbedaan dalam pengembangan cerita, termasuk pada bagian yang mengisahkan kematian Raja Si Ujut (Harun, 1985). Latar belakang tekstual tersebut mengharuskan adanya perbedaan antara hikayat sebagai bukti langsung suatu peristiwa dan hikayat sebagai lapisan ingatan budaya. Atas dasar itu, *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda* tidak dibaca

sebagai kronik yang menyajikan masa lalu secara transparan, melainkan sebagai reproduksi yang menafsirkan kembali kekuasaan Aceh, hubungan antarkerajaan Melayu, dan nilai-nilai yang dianggap ideal oleh masyarakat pewarisnya (Hijjas, 2024).

Hubungan Aceh dan Johor menempati posisi sentral dalam rangkaian cerita. Relasi tersebut bermula ketika Raja Raden dan Raja Si Ujut meminta Sultan Iskandar Muda menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Putri Pahang. Keputusan yang diambil sultan kemudian menempatkan Aceh yang memiliki kekuatan militer, sekaligus pusat otoritas hukum dan moral. Kekuasaan Aceh selanjutnya dibangun dan diperluas melalui beberapa jalur, antara lain Islamisasi, perkawinan politik, hubungan kekerabatan, dan pembentukan loyalitas. Raja Raden dapat diterima ke dalam tatanan kekuasaan karena bersedia mematuhi keputusan sultan serta membangun hubungan kekeluargaan dengan istana Aceh. Sebaliknya, Si Ujut ditempatkan di luar tatanan karena menolak keputusan tersebut, menyimpan dendam, dan melakukan tindakan yang dipandang merusak ketertiban. Dengan demikian, Johor tidak direpresentasikan sebagai satu kesatuan yang sepenuhnya berlawanan dengan Aceh. Melalui tokoh Raja Raden, Johor hadir sebagai sekutu, sedangkan melalui Si Ujut, Johor digambarkan sebagai sumber ancaman (Andaya, 2008). Perselisihan tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik yang memiliki dimensi politik sekaligus maritim. Pengejaran terhadap Si Ujut melibatkan pengerahan rakyat, panglima, ulama, berbagai wilayah pesisir, dan armada Cakra Donya. Keterlibatan sejumlah unsur tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan kerajaan tidak semata-mata berpusat pada pribadi sultan (Reid, 2015).

Penelitian mengenai Aceh dan dunia Melayu sejauh ini telah berkembang ke dalam beberapa kecenderungan. Kajian tentang simbol dan budaya material, misalnya menunjukkan keterhubungan kedaulatan Aceh dengan jaringan Islam transregional melalui penggunaan cap kerajaan dan keberadaan tradisi material Islam di Sumatera Utara (Feener, 2013). Penelitian mengenai sistem pertahanan menyoroti proses pelebagaan kekuasaan melalui penguasaan dan pengaturan

ruang (McKinnon, 2009). Sementara itu, kajian sastra dan budaya istana menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan Melayu dibentuk melalui genealogi, hubungan simbolik dengan raja Rum, nobat, upacara, bunyi-bunyian, dan penggunaan regalia kerajaan (Halid, 2018). Kajian diplomasi dan hukum juga telah membahas pragmatisme dalam aliansi Aceh–VOC serta kedudukan teks konstitusional dalam proses perundingan otoritas di Johor (I. R. Hussin, 2016). Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan Melayu dibentuk oleh unsur-unsur keagamaan, simbolik, material, tekstual, politik, dan maritim yang saling berkaitan.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum memperoleh perhatian secara memadai. Penelitian diplomasi pada umumnya lebih berorientasi pada rekonstruksi peristiwa berdasarkan dokumen arsip. Kajian budaya material, di sisi lain, cenderung memusatkan perhatian pada benda, ritual, atau simbol tertentu. Johor juga lebih sering dibahas sebagai subjek politik melalui teks hukum atau sumber sejarahnya sendiri, bukan sebagai kerajaan yang dihadirkan melalui ingatan naratif Aceh. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kerap diposisikan sebagai entitas yang homogen. Sebaliknya, Si Ujut dikeluarkan dari tatanan tersebut karena penolakan, pengingkaran, dan kekerasan. Sejauh penelusuran yang dilakukan, mekanisme penerimaan dan penolakan tersebut belum dikaji secara khusus melalui perspektif antropologi sastra.

Dalam penelitian ini, perspektif antropologi sastra dipertajam dengan konsep menggunakan relasi kuasa Foucault (Briggs, 2003). Konsep tersebut berfungsi sebagai alat baca untuk memahami cara kekuasaan bekerja dalam teks, bukan sebagai pengganti kerangka antropologi sastra. Kekhasan analisis ini terletak pada tiga hal. Pertama, hikayat diperlakukan sebagai produk budaya yang menyimpan sistem nilai, kepercayaan, organisasi sosial, kekerabatan, dan teknologi masyarakat pendukungnya. Kedua, satuan analisisnya berupa unsur budaya yang terwujud dalam tokoh, tindakan, dan peristiwa. Ketiga, penafsiran selalu menghubungkan struktur naratif dengan sistem budaya yang melatarinya tanpa menguji kebenaran faktual peristiwa. Dengan pembagian ini, konsep

Foucault membantu menamai mekanisme kuasa, sedangkan antropologi sastra menentukan apa yang dibaca dan bagaimana temuan dimaknai. Foucault memandang kekuasaan bukan sekadar sesuatu yang dimiliki dan dipakai secara represif, melainkan jaringan produktif yang membentuk kebenaran, identitas, hierarki, serta kepatuhan (Feener et al., 2011).

Kebaruan berikutnya berhubungan dengan representasi ganda Johor yang dapat digunakan untuk meninjau kembali pembacaan biner mengenai pertentangan Aceh melawan Johor. Hikayat tidak sepenuhnya membangun oposisi berdasarkan perbedaan etnis ataupun batas kerajaan. Pertentangan utamanya justru berlangsung antara kekuasaan yang bersedia tunduk pada keadilan, Islam, kekerabatan, dan kesetiaan dengan kekuasaan yang dikonstruksikan sebagai ingkar, pendendam, dan merusak ketertiban. Atas dasar itu, penerimaan Raja Raden dan penolakan terhadap Si Ujut bukan hanya menunjukkan perbedaan sikap antartokoh. Keduanya merupakan cara teks membentuk klasifikasi moral terhadap pihak yang dapat diterima dan pihak yang harus dikeluarkan dari tatanan kekuasaan.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menempatkan hikayat sebagai salah satu lapisan memori budaya, bukan sebagai pengganti sumber sejarah. Perhatian analisis tidak semata-mata diarahkan pada benar atau tidaknya peristiwa yang diceritakan. Analisis lebih difokuskan pada alasan tradisi Aceh mengingat Johor, konflik, kemenangan, penghukuman, dan pemulihan kemakmuran melalui susunan cerita tertentu (Khan, 2010). Variasi antarteks, percampuran antara sejarah dan legenda, serta idealisasi kemenangan tidak langsung dianggap sebagai kelemahan sumber. Unsur-unsur tersebut justru dipahami sebagai bagian dari praktik budaya yang membentuk gambaran normatif mengenai masa lalu (Hijjas, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk relasi kuasa Aceh–Johor dalam *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda*. Penelitian ini juga diarahkan untuk menjelaskan mekanisme budaya yang digunakan teks dalam menerima, mengesahkan, atau

menolak kekuasaan serta menafsirkan fungsi mekanisme tersebut dalam konstruksi memori budaya mengenai Aceh sebagai pusat otoritas Melayu-Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas penerapan antropologi sastra pada kajian politik antarkesultanan. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan model tiga pola yang diturunkan dari lima sirkuit relasi kuasa, sehingga dapat dipakai untuk membaca hubungan hukum, agama, kekerabatan, kekuatan maritim, dan penghukuman dalam teks hikayat (Harjono et al., 2023). Secara historiografis, kajian ini menegaskan perlunya membedakan peristiwa sejarah dari representasi budaya mengenai sejarah. Sementara itu, secara sosial-kultural, penelitian ini menempatkan hikayat sebagai arsip budaya yang menyimpan pengetahuan masyarakat Melayu mengenai keadilan, agama, kepemimpinan, kekerabatan, peperangan, ketertiban, dan hubungan lintas wilayah (Nugroho et al., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan rancangan studi kasus tekstual tunggal. Kasus yang teliti ialah representasi relasi kuasa Aceh–Johor dalam *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda* edisi alih aksara Ramli Harun (1985), bukan keseluruhan hubungan historis kedua kesultanan. Objek materialnya ialah teks dalam edisi tersebut, sedangkan objek formalnya adalah hubungan kuasa yang direpresentasikan melalui penokohan, tuturan, tindakan, dan akibat peristiwa. Ringkasan berbahasa Indonesia digunakan untuk menelusuri urutan episode, penafsiran diperiksa terhadap alih aksara berbahasa Aceh dan pengantar penyunting. Kedua lapisan penyajian ini dibedakan agar parafrasa ringkasan tidak diperlakukan sebagai kutipan langsung larik hikayat. Pengumpulan data mengikuti metode simak dan teknik catat yang diterapkan melalui pembacaan teks tertulis secara teliti dan berulang (Mahsun, 2005). Pembacaan keseluruhan cerita dilanjutkan dengan pemilihan purposif atas bagian yang menunjukkan penilaian moral, penyelesaian sengketa, penerimaan agama, perkawinan, musyawarah, mobilisasi armada, penawanan, serta penghukuman. Satuan analisis berupa kelompok peristiwa yang

mempertahankan hubungan antara pelaku, tindakan, tanggapan, dan akibat naratif. Dua belas kelompok data diberi kode RK-01 sampai dengan RK-12. Lokasi ringkasan dicatat bersama bagian alih aksara yang relevan. Kode tersebut menunjukkan unit analisis, bukan jumlah seluruh kemunculan motif dalam hikayat.

Penafsiran diperiksa melalui pencocokan data dengan konteks sebelum dan sesudahnya, perbandingan antara ringkasan dan alih aksara dalam edisi yang sama, serta perbandingan dengan penelitian sejarah dan kebudayaan yang relevan. Pencocokan dalam satu edisi merupakan verifikasi tekstual, bukan dua sumber empiris yang independen. Kajian terdahulu digunakan untuk menilai kewajaran konteks dan memperjelas persamaan maupun perbedaan objek, tanpa menjadikannya pembuktian faktual atas peristiwa cerita. Perspektif antropologi sastra Ratna (2011) dan konsep relasi kuasa Foucault (2003) digunakan secara berjenjang, yang pertama memandu pembacaan unsur budaya, sedangkan yang kedua membantu menjelaskan pengaturan tindakan antartokoh. Analisis tematik-interpretatif dipadukan dengan metode padan ekstralingual untuk menghubungkan satuan bahasa dengan pranata, keyakinan, kekerabatan, organisasi, dan kebudayaan material yang direpresentasikan dalam cerita (Mahsun, 2005). Pengodean tingkat pertama menggunakan lima sirkuit: yuridis, religius, kekerabatan, militer-maritim, dan punitif. Sirkuit yuridis mencakup norma janji, penilaian kelayakan, serta prosedur keputusan, religius mencakup sumpah, penerimaan Islam, dan doa, kekerabatan mencakup perkawinan dan afiliasi istana, militer-maritim mencakup musyawarah perang, pembagian peran, serta armada, punitif mencakup penawanan dan penghukuman. Satu unit dapat memperoleh lebih dari satu kode apabila konteksnya memperlihatkan pertautan unsur tersebut. Etika kepemimpinan dan ketertiban diperlakukan sebagai nilai yang melintasi sirkuit, bukan sebagai sirkuit tambahan. Pada tingkat kedua, hubungan antarsirkuit disintesis secara induktif dengan membandingkan perubahan status tokoh, arah tindakan, dan akibat naratifnya. Rangkaian penerimaan Raja Raden menjadi kerabat serta panglima diberi kategori integratif,

rangkaian menghadapi kekerasan Si Ujut hingga penawanannya diberi kategori koersif, hubungan antara berakhirnya ancaman dan penggambaran negeri yang aman serta makmur diberi kategori restoratif. Kategori terakhir terutama bertumpu pada penutup RK-12 yang dibaca bersama gangguan ketertiban dalam RK-08. Dengan demikian, restoratif merupakan istilah analitis untuk fungsi pemulihan dalam cerita, bukan kategori yang diambil langsung dari Foucault atau konsep keadilan restoratif modern. Hubungan kode, indikator, dan pola dicantumkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 agar dasar sintesisnya dapat ditelusuri.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis terhadap dua belas kelompok peristiwa memperlihatkan perubahan kedudukan Raja Raden dan Si Ujut dalam hubungan mereka dengan istana Aceh. Raja Raden bergerak dari pemohon penyelesaian perkara menjadi kerabat dan panglima pendamping. Si Ujut bergerak dari pihak yang mengajukan sengketa menjadi pelaku kekerasan, lawan perang, dan tawanan. Perbedaan ini dibentuk melalui lima sirkuit relasi kuasa yang saling berkaitan. Sirkuit merupakan ranah bekerjanya mekanisme budaya, sedangkan pola integratif dan koersif serta fungsi restoratif merupakan hasil sintesis atas hubungan antarmekanisme dalam rangkaian peristiwa. Kelima sirkuit tidak diperlakukan sebagai lima tahap kronologis yang selalu terpisah. Tabel 1 menyajikan kutipan langsung larik berbahasa Aceh dari edisi alih aksara Harun (1985), disertai nomor halaman cetak sumber. Kutipan dipilih sesuai indikator sirkuit, unsur budaya, dan makna naratif pada setiap unit, apabila satu unit mencakup beberapa episode, petikan dari masing-masing halaman disajikan secara terpisah. Pemetaan tingkat pertama mempertahankan tumpang tindih kode ketika satu episode mempertemukan beberapa unsur budaya.

Tabel 1

Data dan pengodean tingkat pertama dalam *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda*

Kode	Teks Asli dan Lokasi Teks	Sirkuit Tingkat Pertama	Unsur Budaya	Makna dalam Cerita
RK-01	“Raja Raden geurasi nan / That budiman hana bagoe / Nyang adoe nyan raja Si Ujut / Sangat meuheut aneuk bisoe / Peurangui brok akai jeuheut / Han jitakot barangkasoe” (hlm. 44).	Yuridis	Etika kepemimpinan	Penilaian moral menjadi dasar awal perbedaan kedudukan kedua tokoh.
RK-02	“Raja Si Ujut jimeusumpah / Kalamullah geuyue baca” (hlm. 46). “Raja Si Ujut jimeuungki / Sumpah janji saboh masa / Ka lheuuh sumpah deungon abang / Putroe Phang judo kakanda” (hlm. 54).	Yuridis dan religius	Janji, sumpah, dan kehormatan	Pelanggaran kesepakatan dinilai sebagai persoalan normatif yang mendapat pengesahan religius.
RK-03	“Tajak mita hukum ade / Bek roh pake geutanyoe dua / Bandua droe saho pike / Hukum ade di Pulo Ruja” (hlm. 55). “Hajat patek ubak deelat / Hukum siat kamoe dua / Bek roh dawa aduen adoe / Hukum jinoe po meukuta” (hlm. 57).	Yuridis	Pranata penyelesaian sengketa	Kewibawaan sultan ditampilkan melalui kedua tokoh yang bersengketa.
RK-04	“Habeh haba bandua droe / Raja nanggroe deungo dumna” (hlm. 58). “Lhee uroe ulon bri tanggoh / Teuma putoh peukara dawa” (hlm. 59).	Yuridis	Pertimbangan dan kehati-hatian	Prosedur mendengar serta menimbang menopang citra keadilan sultan.
RK-05	“Talo gata bak hukum nyoe / Tuan putroe judo kakanda / Janji gata han jeuet ubah / Bak poteu Allah lon teumeureuka / Ulon hukum ban peuneugah / Ka bit salah janji gata” (hlm. 61).	Yuridis	Janji dan kewenangan raja	Putusan mengesahkan klaim Raja Raden dan memperkuat kewenangan penengah.

Kode	Teks Asli dan Lokasi Teks	Sirkuit Tingkat Pertama	Unsur Budaya	Makna dalam Cerita
RK-06	<p>“Agama Iseulam hana hajat / Goh lom sisat miseue gata” (hlm. 59).</p> <p>“Putroe cut tinggai bak raja / Seureuta deungon raja Raden / Manyoh meusyen tamong agama” (hlm. 61).</p> <p>“Raja Raden tamong Iseulam / Tron ilham dalam dada / Ngon seunang droe raja meutuah / Tan peurintah deungon paksa” (hlm. 62).</p>	Religius	Keyakinan dan afiliasi	Agama menyertai kedekatan dengan istana, tanpa menjadi satu-satunya penentu konflik.
RK-07	<p>“Oh lheueh nikah kadi neuwoe / Tinggai putroe sajan raja / Teutap sinan putroe siti / Peurmaisuri IskandarMuda” (hlm. 64).</p> <p>“Raja Raden geuba jinoe / Ubak putroe cut Ti Jeumpa [...] Teungku kadi le peunikah / Ngon Bismillah phon neumula” (hlm. 65).</p>	Kekerabatan	Perkawinan dan hubungan istana	Perkawinan mengubah kedudukan Raja Raden dari pihak luar menjadi kerabat.
RK-08	<p>“Jak meurampok dalam peukan / Sigala barang maniaga [...] Nyang jiseksa han peue peugah / Capiiek patah han ek kira” (hlm. 70).</p> <p>“Habeh jitot dumna rumoh / Lom ngon jipoh po hareuta” (hlm. 71).</p>	Militer-maritim	Perlindungan rakyat dan ketertiban	Kekerasan menjadi alasan naratif bagi pengerahan kekuatan terhadap Si Ujut.
RK-09	<p>“Meunyo tuanku neujak muprang / Beudoh rijang po meukuta / Patek tuanku ikot sajan / Jak lawan prang Johor Lila” (hlm. 74).</p> <p>“Muwapakat ngon uleebalang / Meukeusud prang Johor Lila” (hlm. 75).</p>	Yuridis dan militer-maritim	Musyawarah dan persekutuan	Keputusan bersama menghubungkan legitimasi tindakan dengan pembentukan aliansi.

Relasi Kuasa Aceh-Johor dalam Hikayat Sultan Aceh...

Kode	Teks Asli dan Lokasi Teks	Sirkuit Tingkat Pertama	Unsur Budaya	Makna dalam Cerita
RK-10	<p><i>“Yue krah rakyat dalam nanggroe / Ban sinaroe tuha muda [...] Yue peuhase dum kapai prang / Peuraho tungkang dengon bahtra”</i> (hlm. 75).</p> <p><i>“Deungon teukeudi nibak Tuhan / Hanyot kayee nyang that raya”</i> (hlm. 76).</p> <p><i>“Teuma neukheun le sulotan / Nan kapai nyan Cakra Donya”</i> (hlm. 77).</p>	Militer-maritim	Teknologi dan organisasi kerja	Armada merepresentasikan kemampuan menghimpun tenaga serta sumber daya.
RK-11	<p><i>“Peutama phon Malem Dagang / Panglima prang nyang keupala”</i> (hlm. 93).</p> <p><i>“Nyang keudua Raja Raden / Bangsa laen di Johor teuka / Teuma keu lhee panglima Pidie / Nyang baro gie poteu raja [...] Teungku Ja Pakeh beuet fatihah / Mohon bak Allah nyang seujahtra”</i> (hlm. 94).</p>	Militer-maritim dan religius	Pembagian peran dan ritual	Kepemimpinan militer ditopang persekutuan serta pengesahan keagamaan.
RK-12	<p><i>“Japu Intan mat di gaki / Geuboh rante laju sigra / Oh sare lheueh geuboh taloe / Geuba jinoo ubak raja”</i> (hlm. 129).</p> <p><i>“Geupoh laju raja Si Ujut / Ka habeh buet laju fana [...] Tan le karu aman teuka / Nanggroe Aceh meutamah makmu”</i> (hlm. 154).</p>	Punitif	Hukuman dan pemulihan ketertiban	Tindakan punitif ditautkan dengan restoratif pada penutup cerita.

Legitimasi awal dibangun melalui janji dan penyelesaian sengketa (RK-01 s.d. RK-05). Rangkaian ini berhubungan dengan agama, perkawinan, serta organisasi militer-maritim (RK-06 s.d. RK-11), kemudian dengan tindakan punitif pada RK-12. Raja Raden tetap menjadi sekutu meskipun berasal dari Johor.

Sintesis tingkat kedua membandingkan perubahan kedudukan tokoh dan akibat naratifnya. Penerimaan Raja Raden menunjukkan pola integratif, mobilisasi terhadap Si Ujut menunjukkan pola koersif, penutup cerita memberi

tindakan punitif fungsi pemulihan. Jejak hubungan antarsirkuitnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Sintesis lima sirkuit menjadi kategori tingkat kedua

Kategori Tingkat Kedua	Jejak Data	Hubungan Antarsirkuit	Dasar Penafsiran
Pola integratif	RK-03 s.d. RK-07, RK-09, RK-11	Yuridis, religius, kekerabatan, dan militer-maritim	Raja Raden memperoleh pengakuan, afiliasi agama, hubungan keluarga, dan peran militer. Arah hubungan ialah memasukkan pihak luar ke dalam tatanan Aceh.
Pola koersif	RK-08 s.d. RK-12, RK-02 dan RK-05 sebagai konteks normatif	Yuridis, militer-maritim, dan punitif	Kekerasan Si Ujut direspons dengan keputusan bersama, armada, pertempuran, dan penawanan. Arah hubungan ialah membatasi serta menundukkan lawan.
Fungsi restoratif	RK-12, dibaca terhadap gangguan pada RK-08	Tindakan punitif ditafsirkan melalui nilai ketertiban yang melintasi sirkuit	Pernyataan aman dan makmur setelah kematian Si Ujut menjadi dasar induksi fungsi pemulihan. Fungsi ini menamai akibat yang diklaim narator, bukan prosedur penghukuman baru.

Pembahasan

Pembahasan menelusuri hubungan antara indikator tekstual, unsur kebudayaan, dan perubahan kedudukan tokoh. Antropologi sastra digunakan untuk menjelaskan makna janji, perkawinan, ritual, pembagian peran, dan kebudayaan material dalam rangkaian cerita (Ratna, 2011). Konsep kuasa membantu membaca akibat hubungan tersebut bagi kemungkinan tindakan para tokoh. Kajian pembandingan memperjelas fungsi unsur budaya dengan memperhatikan bahan dan periode masing-masing penelitian. Dengan batas ini, citra Aceh sebagai pusat otoritas dibaca sebagai hasil penceritaan dalam satu edisi.

Data RK-01

Pada RK-01, narator memperkenalkan Raja Raden melalui budi yang baik dan Si Ujut melalui perangai yang buruk (Harun, 1985: 44). Pembedaan ini

mendahului keputusan sultan dan memengaruhi arah penilaian terhadap tindakan berikutnya. Etika kepemimpinan menjadi unsur budaya yang menghubungkan penokohan dengan kelayakan berada dalam tatanan istana. Dalam pengodean, penilaian moral dimasukkan ke sirkuit yuridis karena berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai kelayakan tokoh sebelum perkara diputuskan.

Pelabelan tersebut perlu dibaca sebagai pilihan narator. Ringkasan juga menuturkan bahwa kedua saudara berangkat menyerang Pahang sebelum berselisih tentang Putri Pahang. Dengan demikian, predikat baik pada Raja Raden tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tindakannya bebas dari kekerasan. Kedudukan yang diterimanya dibangun melalui janji, keputusan, dan afiliasi pada episode selanjutnya. Pembacaan ini memperlihatkan bagaimana teks memilih perilaku tertentu sebagai ukuran kelayakan, sekaligus menyisakan ketegangan dalam citra penguasa yang diidealkannya.

Data RK-02

RK-02 menghubungkan perselisihan dengan pelanggaran kesepakatan tentang Putri Pahang. Larik “Raja Si Ujut jimeuungki / Sumpah janji saboh masa” menyatakan pelanggaran tersebut, sedangkan larik “Raja Si Ujut jimeusumpah / Kalamullah geuyue baca” memperlihatkan pengesahan janji melalui sumpah dan pembacaan Kalamullah (Harun, 1985: 46-54). Kehadiran unsur religius memperkuat kedudukan janji sebagai norma yang melampaui kehendak sesaat tokoh. Karena itu, unit ini dikodekan dalam sirkuit yuridis sekaligus religius. Penolakan terhadap Si Ujut mulai dibangun melalui pertentangan antara tindakannya dan kesepakatan yang telah disahkan.

Hussin (2013) menelaah hubungan teks konstitusi, Majalah, dan perundingan otoritas di Johor pada akhir abad ke-19. Perbandingannya terletak pada fungsi pernyataan normatif dalam membentuk kewenangan. Dalam hikayat, fungsi itu hadir melalui sumpah dan perjanjian antartokoh, bukan melalui dokumen konstitusional. Perbedaan bahan dan periode memperlihatkan dua cara penyajian norma, yakni kajian Hussin membahas perundingan kewenangan

melalui dokumen legal, sedangkan hikayat menghadirkannya melalui perjanjian dan konsekuensi pelanggaran antartokoh.

Data RK-03

Pada RK-03, Raja Raden dan Si Ujut menyerahkan sengketa kepada Sultan Iskandar Muda karena reputasinya sebagai penguasa yang adil (Harun, 1985: 55-57). Relasi kuasa terbentuk ketika dua pihak menerima kedudukan tokoh lain sebagai penengah. Dalam perspektif antropologi sastra, tindakan tersebut merepresentasikan pranata penyelesaian sengketa dan harapan tentang kewibawaan raja. Pengakuan yang dapat dibuktikan berasal dari kedua tokoh dalam episode ini, data tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh Kesultanan Johor secara formal mengakui yurisdiksi Aceh.

Kajian Gallop (2004) menunjukkan bahwa cap kerajaan Aceh dapat dibaca dalam hubungan dengan tradisi simbolik Ottoman. Persamaannya terletak pada pentingnya unsur simbolik bagi penyajian kewibawaan kerajaan. Bahan yang digunakan berbeda, Gallop mengkaji artefak kerajaan, sedangkan RK-03 memperlihatkan pengakuan melalui tindakan tokoh. Dalam cerita, kewibawaan memperoleh bentuk relasional ketika pihak luar memilih sultan sebagai pusat pertimbangan. Pengakuan tersebut membuka jalan bagi keterlibatan Aceh dalam menentukan arah hubungan kedua tokoh Johor.

Data RK-04

RK-04 memperlihatkan dua tindakan yang menopang citra keadilan sultan, seperti mendengar keterangan kedua pihak dan menanggguhkan keputusan selama tiga hari (Harun, 1985: 58-60). Jeda tersebut memberikan ruang naratif bagi pertimbangan penguasa. Kewibawaan sultan dibentuk melalui cara menjalankan peran penengah, sehingga sifat adil tidak hanya dinyatakan pada pengenalan tokoh. Penundaan membedakan waktu pengaduan dari pemutusan perkara, sehingga keputusan tampil sebagai hasil prosedur yang diatur istana.

Metode padan ekstralingual membantu menghubungkan tindakan mendengar dan menunggu dengan nilai kehati-hatian dalam mengambil keputusan (Mahsun, 2005). Dalam urutan tersebut, kewibawaan penengah memperoleh dasar melalui tindakan yang dapat dikenali oleh pihak yang

bersengketa. Jika RK-03 memperlihatkan pengakuan terhadap penengah, RK-04 menunjukkan perilaku yang menopang pengakuan itu. Keduanya membangun sirkuit yuridis sebagai proses relasional, antara lain pihak yang bersengketa memberikan keterangan dan penguasa menempatkan diri sebagai pihak yang mempertimbangkannya.

Data RK-05

Putusan pada RK-05 mengesahkan klaim Raja Raden atas perkawinan yang sebelumnya dijanjikan dan menyatakan pengingkaran Si Ujut sebagai tindakan yang salah (Harun, 1985: 61). Akibatnya, kedua tokoh memperoleh kedudukan yang berbeda di hadapan penengah. Konsep relasi kuasa membantu membaca perubahan kemungkinan tindakan setelah putusan: Raja Raden memperoleh pengakuan, sedangkan keinginan Si Ujut dibatasi. Dengan pengertian ini, keputusan memiliki akibat sosial bagi tokoh dan menjadi dasar bagi peristiwa penerimaan atau penolakan berikutnya.

Dalam hubungan dengan kajian Hussin (2013) , kewenangan dibentuk melalui pernyataan yang mengikat dan menata kedudukan para pihak. Hikayat menampilkan proses itu melalui putusan sultan. Perkembangan RK-07 juga menunjukkan bahwa istana Aceh kemudian memperoleh hubungan perkawinan dengan Putri Pahang. Karena itu, citra keadilan dalam cerita perlu dibaca bersama pemusatan afiliasi pada istana penengah. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi moral dan keuntungan politik dapat bertemu dalam satu rangkaian naratif.

Data RK-06

RK-06 memperlihatkan penerimaan Islam oleh Raja Raden dan Putri Pahang serta penolakan Si Ujut terhadap ajakan yang disampaikan di istana (Harun, 1985: 59-62). Alih aksara menekankan kemauan Raja Raden sendiri, sehingga konversinya tidak tepat disebut sebagai hasil paksaan sultan. Agama hadir sebagai unsur kepercayaan yang menyertai perubahan hubungan sosial: tokoh yang menerima Islam menetap dan membangun kedekatan dengan Aceh. Kemudian, Feener (2013) melalui batu nisan dan kebudayaan material,

menjelaskan pembentukan ekspresi Muslim di Sumatera bagian utara. Kajian tersebut menyediakan perbandingan tentang hubungan agama dan bentuk kebudayaan, dengan bahan serta periode yang berbeda. Dalam data hikayat ini, penerimaan agama memperoleh fungsi afiliasi melalui keterkaitannya dengan perkawinan dan loyalitas. Penolakan Si Ujut bukan alasan tunggal bagi tindakan militer terhadapnya, kekerasan kepada penduduk pada RK-08 menjadi pemicu yang dinyatakan dalam rangkaian cerita.

Data RK-07

RK-07 menyajikan dua hubungan perkawinan yang berbeda, yakni Putri Pahang menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda, sedangkan Raja Raden dinikahkan dengan Putri Ti Jeumpa, adik sultan (Harun, 1985: 64-65). Perkawinan Raja Raden membentuk hubungan kekerabatan dengan istana Aceh, sehingga perlindungan dan loyalitas memperoleh dasar kekeluargaan. Antropologi sastra membaca perubahan ini melalui hubungan antara perkawinan dan organisasi sosial (Ratna, 2011). Braginsky (2008) menjelaskan pembentukan ruang dinastik dalam teks Melayu melalui hubungan antargaris keturunan kerajaan. Temuan RK-07 memperlihatkan fungsi afiliasi itu pada perubahan kedudukan satu tokoh. Putri Pahang menempati posisi penting dalam pertukaran afiliasi antarelite, sedangkan penyelesaian sengketaanya dikelola melalui keputusan para penguasa laki-laki. Hubungan ini memperlihatkan kewenangan istana dalam mengatur perkawinan dan kedudukan sosial para tokoh.

Data RK-08

Pada RK-08, Si Ujut merampas harta, mencederai penduduk, dan membakar permukiman di Aceh (Harun, 1985: 70-71). Sasaran kekerasan bergeser dari perselisihan elite kepada kehidupan masyarakat. Perubahan ini memberi dasar naratif bagi respons militer sultan. Dalam pengodean tingkat pertama, peristiwa tersebut masuk ke sirkuit militer-maritim karena memperlihatkan penggunaan kekuatan bersenjata dan menjadi pemicu pengerahan armada. Nilai perlindungan rakyat diperlakukan sebagai ukuran lintas sirkuit yang digunakan narator untuk membedakan kekerasan Si Ujut dari tindakan yang kemudian dilakukan Aceh.

McKinnon (2009) menelaah pertahanan Aceh melalui peninggalan serta pengaturan ruang pertahanan. Kajian tersebut membantu menempatkan keamanan sebagai persoalan penting dalam organisasi kerajaan. Sumbangan analisis RK-08 terletak pada alasan budaya yang dipakai cerita untuk memberi makna pada tindakan militer. Kekerasan terhadap masyarakat menjadikan Si Ujut lawan yang harus dihadapi menurut tatanan nilai narasi. Narasi mengalihkan pusat penilaian dari perebutan Putri Pahang kepada kewajiban melindungi penduduk, sehingga perang memperoleh alasan sosial di samping kepentingan elite.

Data RK-09

RK-09 memperlihatkan sultan bermusyawarah dengan Raja Raden sebelum mengejar Si Ujut ke Johor (Harun, 1985: 74-75). Musyawarah menghubungkan pertimbangan tindakan dengan pembentukan persekutuan. Sirkuit yuridis bekerja pada penetapan tindakan yang dinilai patut, sedangkan sirkuit militer-maritim bekerja pada tujuan operasi yang disepakati. Kedudukan Raja Raden penting karena ia berasal dari Johor, bersaudara dengan Si Ujut, dan telah menjadi kerabat istana Aceh. Loyalitas politiknya terbentuk melalui hubungan yang berkembang dalam cerita, sehingga asal kerajaan tidak menentukan seluruh kemungkinan afiliasinya.

Khan (2010) membahas perundingan dan kegagalan aliansi Aceh-VOC dalam rencana penaklukan Melaka pada 1640 s.d. 1641. Kajian itu memperlihatkan pentingnya kepentingan dan kepercayaan dalam hubungan antarpelaku politik. RK-09 memberi bahan berbeda berupa musyawarah yang dinarasikan sebagai dasar persekutuan sultan dan Raja Raden. Perbandingan ini membantu menjelaskan aliansi sebagai hubungan yang perlu dibentuk. Kehadiran Raja Raden di pihak Aceh juga membatasi pembacaan konflik sebagai permusuhan terhadap semua tokoh Johor, tanpa menghapus kenyataan bahwa operasi dalam cerita diarahkan ke wilayah Johor.

Data RK-10

RK-10 menampilkan mobilisasi rakyat untuk membangun kapal perang. Sumber membedakan keseluruhan armada dari satu kapal yang dibuat menggunakan kayu hanyut dan diberi nama Cakra Donya (Harun, 1985: 75-77). Nama Cakra Donya merujuk pada kapal tertentu yang menjadi bagian dari kekuatan maritim kerajaan. Sebagai unsur kebudayaan material, kapal menghubungkan pengetahuan teknologi, tenaga kerja, bahan, dan komando. Keberadaan armada memperlihatkan kemampuan pusat kerajaan mengorganisasi sumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah dirumuskan bersama para pendukungnya.

Hubungan dengan kajian McKinnon (2009) terletak pada arti infrastruktur bagi kemampuan pertahanan, meskipun bahan kajiannya berbeda. Dalam hikayat, proses pembuatan kapal mendapat fungsi representasional karena menunjukkan bahwa perintah sultan dapat dilaksanakan melalui organisasi kerja. Pengerahan rakyat menempatkan pekerjaan dan kebutuhan teknologi di bawah komando sultan. Antropologi sastra memperlihatkan hubungan hierarkis ini melalui pembagian pekerjaan serta kemampuan penguasa menyatukan hasilnya menjadi armada. Dengan demikian, kebudayaan material juga merepresentasikan organisasi sosial yang memungkinkan benda tersebut dihasilkan.

Data RK-11

RK-11 menunjukkan pembagian peran dalam persiapan perang, seperti Malem Dagang menjadi panglima utama, Raja Raden serta Panglima Pidie menjadi pendamping, dan Ja Pakeh membacakan doa (Harun, 1985: 93-94). Pelantikan dan doa mempertautkan organisasi militer dengan sistem kepercayaan. Pada tingkat pertama, unit ini memperoleh kode militer-maritim dan religius. Pada tingkat kedua, pengangkatan Raja Raden menjadi panglima merupakan bukti kelanjutan integrasinya, sedangkan pengerahan pasukan menjadi bagian dari pola koersif terhadap Si Ujut. Perbedaan fungsi itu menjelaskan mengapa satu unit dapat menopang lebih dari satu pola.

Halid (2018) mengkaji fungsi nobat dalam budaya politik *Hikayat Patani*, sedangkan Feener (2021) menelaah bunyi dan seremoni kerajaan melalui

Adat Aceh. Keduanya memberikan perbandingan tentang hubungan praktik budaya istana dengan kewibawaan penguasa. RK-11 menunjukkan pengesahan religius pada konteks persiapan perang melalui doa Ja Pakeh. Kesamaan fungsi legitimasi terletak pada penautan kewenangan politik dengan praktik kebudayaan istana. Pada RK-11, bentuknya adalah doa keselamatan yang menyertai pelantikan panglima, sehingga keputusan militer memperoleh pengesahan religius dalam rangkaian cerita.

Data RK-12

Pada RK-12, kedudukan Si Ujut berubah dari pemimpin perlawanan menjadi tawanan yang dirantai dan dibawa menghadap sultan. Larik “Geuboh rante laju sigra” dan “Geuba jinoe ubak raja” memperlihatkan pengekangan tubuh serta penghadapan tawanan kepada penguasa (Harun, 1985: 129). Penghukuman sampai kematian Si Ujut dinyatakan melalui larik “Geupoh laju raja Si Ujut / Ka habeh buet laju fana” (Harun, 1985: 154). Alih aksara menutup rangkaian itu dengan larik “*Tan le karu aman teuka / Nanggroe Aceh meutamah makmu*”(Harun, 1985: 154). Dalam konteks penutup, larik tersebut menghubungkan berakhirnya kekacauan dengan kedatangan keamanan dan bertambahnya kemakmuran Aceh. Perubahan kedudukan tawanan merupakan indikator sirkuit punitif, pernyataan tentang keadaan negeri menjadi dasar bagi pembacaan fungsi restoratif.

Penamaan restoratif diperoleh melalui hubungan antarepisode, antara lain RK-08 menghadirkan gangguan terhadap penduduk, sedangkan RK-12 menghadirkan berakhirnya ancaman dan pemulihan tatanan menurut narator. Hubungan ini menghasilkan penafsiran fungsi naratif, bukan pembuktian bahwa penghukuman menyebabkan kemakmuran secara empiris. Foucault (1982) membedakan pengaturan kemungkinan tindakan dari kekerasan yang langsung mengenai tubuh. Karena itu, pelaksanaan hukuman tidak disamakan begitu saja dengan seluruh pengertian relasi kuasa. Istilah restoratif juga tidak menyebut

prosedur rekonsiliasi atau keadilan restoratif modern, melainkan cara penutup cerita memaknai hasil penyingkiran lawan.

Jejak analisis pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa lima sirkuit dan tiga kategori hasil sintesis berada pada tingkat penjelasan yang berbeda. Lima sirkuit mengidentifikasi ranah mekanisme dalam unit data, sedangkan kategori tingkat kedua menjelaskan fungsi hubungan antarmekanisme dalam perjalanan tokoh. Penerimaan Raja Raden bermula dari pengakuan dalam penyelesaian sengketa, berhubungan dengan penerimaan Islam serta perkawinan, lalu memperoleh bentuk organisasi melalui peran panglima. Penolakan terhadap Si Ujut dibangun melalui pengingkaran janji dan kekerasan, diikuti keputusan perang, pengerahan armada, serta penawanan. Sintesis ini menjelaskan hubungan antara nilai, pranata, tindakan, dan akibat yang menjadi perhatian antropologi sastra.

Kekhususan antropologi sastra dalam temuan ini terletak pada penjelasan tentang fungsi budaya unsur cerita. Janji memperoleh daya ikat melalui sumpah, keputusan memperoleh kewibawaan melalui peran penengah, perkawinan membentuk afiliasi, dan ritual menyertai pembagian tugas. Cakra Donya memperlihatkan hubungan antara benda, tenaga kerja, serta organisasi. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam pembentukan kedudukan tokoh. Konsep relasi kuasa membantu menjelaskan akibat hubungan itu, sedangkan kategori tingkat kedua merupakan hasil penafsiran atas susunan peristiwa.

Pola integratif terbentuk ketika sirkuit yuridis, religius, kekerabatan, dan militer-maritim mengubah pihak luar menjadi bagian dari istana. Pola koersif terbentuk ketika pertimbangan normatif, mobilisasi kekuatan, dan tindakan punitif membatasi serta menundukkan lawan. Fungsi restoratif dirumuskan dari pemaknaan akhir atas tindakan itu, terutama melalui kontras antara gangguan pada RK-08 dan ketertiban pada RK-12. Ketiga kategori tersebut bukan tahapan yang selalu terpisah dan bukan tiga jenis kekuasaan yang diklaim berasal langsung dari Foucault. Seleksi budaya terhadap kekuasaan menamai cara narasi menghubungkan penerimaan, pengendalian, dan penyingkiran tokoh dengan nilai yang dipusatkan pada istana Aceh.

Pemaknaan penutup juga memperlihatkan sudut pandang narasi. Pemulihan ditandai oleh keamanan Aceh dan ketenteraman pusat kerajaan, sementara pengalaman pihak yang ditaklukkan tidak memperoleh ruang yang sebanding dalam dua belas kelompok data. Karena itu, istilah restoratif menunjuk pada tatanan yang dianggap pulih oleh cerita. Penafsiran ini membuat klaim tentang raja ideal tetap dapat dibaca secara kritis dan tidak mengubah keberpihakan narator menjadi kesimpulan sejarah yang netral.

Sebagai studi satu edisi, penelitian ini menjelaskan konstruksi memori budaya tentang Aceh sebagai pusat otoritas Melayu-Islam dalam teks yang digunakan. Fungsi restoratif terutama ditopang satu rangkaian penutup, sehingga daya jelaskannya bergantung pada hubungan naratif dengan episode sebelumnya, bukan pada banyaknya contoh lintas naskah. Kajian ini belum menyediakan data penerimaan pembaca, pertunjukan, atau transmisi antargenerasi. Perbandingan versi dan penelitian resepsi diperlukan untuk menilai sejauh mana konstruksi tersebut diterima, diubah, atau diperdebatkan di luar teks.

Simpulan

Representasi relasi kuasa Aceh–Johor dalam *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda* edisi Harun (1985) dibentuk melalui hubungan antara norma janji, kewibawaan penengah, agama, perkawinan, organisasi militer-maritim, dan penghukuman. Analisis dua belas kelompok data menghasilkan lima sirkuit tingkat pertama, yaitu yuridis, religius, kekerabatan, militer-maritim, serta punitif. Hubungan antarsirkuit disintesis menjadi pola integratif dan koersif serta fungsi restoratif pada penutup cerita. Pola integratif menjelaskan perubahan Raja Raden dari pemohon penyelesaian perkara menjadi kerabat dan panglima. Pola koersif menjelaskan pengerahan kekuatan terhadap kekerasan Si Ujut hingga penawannya. Fungsi restoratif merupakan temuan induktif dari penutup yang menghubungkan kematian Si Ujut dengan keamanan dan kemakmuran Aceh, bukan kategori langsung Foucault atau prosedur keadilan restoratif modern. Hasil ini memperlihatkan seleksi budaya terhadap kekuasaan sebagai

cara cerita menempatkan tokoh berdasarkan tindakan serta afiliasinya dengan tatanan istana Aceh. Kehadiran Raja Raden sebagai sekutu membatasi pembacaan Johor sebagai pihak yang sepenuhnya homogen. Temuan tersebut memberikan pemahaman bahwa hikayat merepresentasikan dan menyimpan konstruksi masa lalu tentang kewibawaan Aceh serta kepemimpinan yang diidealkan meskipun jangkauannya tidak mencakup pembuktian penerimaan masyarakat atau kebenaran seluruh peristiwa sejarah.

Daftar Pustaka

- Andaya, L. Y. (2008). *Leaves of the same tree: Trade and ethnicity in the Straits of Melaka*. University of Hawaii Press.
- Braginsky, V. (2008). Structure, date and sources of Hikayat Aceh revisited: The problem of Mughal-Malay literary ties. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 162(4), 441–467.
- Briggs, C. L. (2003). Interviewing, power/knowledge, and social inequality. *Postmodern Interviewing*, 243–254.
- Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Feener, R. M., Daly, P., Edwards McKinnon, E., En-Ci, L. L., Ardiansyah, Nizamuddin, Ismail, N., Seng, T. Y., Rahardjo, J., & Sieh, K. (2021). Islamisation and the formation of vernacular Muslim material culture in 15th-century northern Sumatra. *Indonesia and the Malay World*, 49(143), 1–41. <https://doi.org/10.1080/13639811.2021.1873564>
- Feener, R. M., Daly, P. T., & Reid, A. (2011). *Mapping the Acehnese past*. KITLV Press Leiden.
- Foucault, M. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795.
- Halid, R. I. B. R. (2018). The nobat in early Malay literature: A look into the Hikayat Patani. *Indonesia and the Malay World*, 46(135), 168–197.
- Harjono, H. S., Hariyadi, B., dan Yugo, P. (2023). Cik Upik application as learning media to identify and describe the hikayat values. *Journal of Education Technology*, 7(2), 269–278. <https://doi.org/10.23887/jet.v7i2.57254>
- Harun, R., dan Sastra, P. P. B. B. (1985). Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda. In (*No Title*). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hijjas, M. (2024). Old names for new things: Two items of Malay royal regalia as invented tradition. *Indonesia and the Malay World*, 52(152), 51–75. <https://doi.org/10.1080/13639811.2024.2307733>
- Hirst, W., & Coman, A. (2018). Building a collective memory: The case for collective forgetting. *Current Opinion in Psychology*, 23, 88–92. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.02.010>

- Hussin, I. (2013). Textual Trajectories: Re-reading the Constitution and Majalah in 1890s Johor. *Indonesia and the Malay World*, 41(120), 255–272. <https://doi.org/10.1080/13639811.2013.798074>
- Hussin, I. R. (2016). *The politics of Islamic law: Local elites, colonial authority, and the making of the Muslim state*. University of Chicago Press.
- Ifnaldi, I. (2020). Nilai-Nilai Filosofis dalam Kaba Rambun Pamenan Karya Sutan Mangkudun dkk. *ESTETIK: Jurnal Bahasa Indonesia*, 3(2), 185–203. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226323480.001.0001>
- Khan, S. B. A. L. (2010). TIES THAT UNBIND: The abortive Aceh–VOC alliance for the conquest of Melaka 1640–1641. *Indonesia and the Malay World*, 38(111), 303–321. <https://doi.org/10.1080/13639811.2010.489374>
- Mahsun, M. S. (2005). *Metode penelitian bahasa: tahapan strategi, metode dan tekniknya*. PT RajaGrafindo Persada.
- McKinnon, E. E. (2009). Aceh's defences. *Indonesia and the Malay World*, 37(109), 345–373. <https://doi.org/10.1080/13639810903269334>
- Nugroho, F. H., Maryaeni, M., Roekhan, R., dan Martutik, M. (2025). Kearifan Bayan Budiman Melalui Pembelajaran Bermuatan Konservasi Budaya. *ESTETIK: Jurnal Bahasa Indonesia*, 8(2), 425–441. <https://doi.org/10.29240/estetik.v8i2.13413>
- Ratna INK. (2011). Antropologi Sastra: Mata Rantai Terakhir Analisis Ekstrinsik. *Mabasan*, 39–51.
- Ratna, N. K. (2011). *Antropologi sastra: Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Pustaka Pelajar.
- Reid, A. (2015). *A history of Southeast Asia: Critical crossroads*. John Wiley and Sons.
- Teh Gallop, A. (2004). Ottoman influences in the seal of sultan alauddin riayat syah of aceh (r. 1589–1604). *Indonesia and the Malay World*, 32(93), 176–190. <https://doi.org/10.1080/1363981042000320125>

